



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : IBU KOTA BARU, RUU IKN Segera Dibahas DPR  
**Tanggal** : Kamis, 23 Januari 2020  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 19

Bisnis, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada akhir pekan ini. Asteria Desi K. asteria.desi@bisnis.com Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan setelah diserahkan kepada Presiden, selanjutnya RUU IKN tersebut dapat dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “RUU IKN ini prinsipnya menggunakan metodologi yang sama yakni omnibus law,” kata Rudy di Jakarta, Rabu (22/1). Dia mengatakan dalam aturan undang-undang tersebut nantinya juga akan terdapat klausul untuk memutuskan beberapa lembaga pemerintahan yang tetap berada di wilayah Jakarta, dalam hal ini seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu dimaksudkan supaya lembaga bersangkutan dapat melakukan pengawasan bisnis secara langsung di Jakarta, mengingat Jakarta tetap menjadi pusat bisnis. “Klausul itu nanti akan disesuaikan,” katanya. Dalam perencanaan Bappenas, groundbreaking pembangunan IKN yang berlokasi di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu dimulai pada 2021 dan pembangunan konstruksi hingga 2024. Namun, pemerintah berharap jika bisa diselesaikan lebih cepat akan lebih baik. Rudy mengatakan saat ini pihaknya rutin menggelar lokakarya untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan masterplan pembangunannya. “Ini kami ingin melihat regional ekonomi. Sektor apa saja yang perlu dikembangkan. Fungsinya Ibu Kota negara sebagai pusat pemerintahan dan kenegaraan,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, Bappenas juga masih menyelesaikan masterplan dan perancangan rencana kerja yang akan dilakukan di Ibu Kota baru tersebut. Salah satunya adalah membentuk badan otorita, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan setingkat menteri, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Badan otorita berkedudukan di Kalimantan Timur, tetapi bila dianggap perlu dapat membuat kantor perwakilan di Jakarta,” lanjutnya. Nantinya, katanya, Badan Otorita tersebut akan melakukan penyusunan strategi persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota baru. MASUK PROLEGNAS Dalam kesempatan berbeda, DPR resmi menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Di dalam Prolegnas 2020 tersebut, rencananya terdapat 50 UU yang akan dibahas dan empat di antaranya merupakan omnibus law, yang salah satunya adalah RUU Ibu Kota Negara. Dalam sidang paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas mengatakan bahwa 50 UU yang masuk dalam prolegnas 2020 sudah disepakati oleh seluruh komisi di DPR. Sementara itu, kepastian sumber pendanaan pembangunan tahap pertama IKN masih menunggu pengesahan RUU IKN. Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan fase pertama dimulai pada kuartal IV tahun ini. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga mengatakan sementara ini pendanaan pembangunan tahap pertama akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dia belum bisa memastikan sumber pendanaan lain seperti investasi asing dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga akan dimanfaatkan atau tidak. “Untuk kepastiannya masih menunggu pengesahan Undang-Undang IKN,” ujarnya kepada Bisnis. Diketahui, biaya yang harus disiapkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun dan pemerintah hanya mampu mendanai sekitar 20% dari APBN atau sekitar Rp89,4 triliun. Sisanya, skema KPBU ditargetkan bisa mendanai senilai Rp253,4,2 triliun (54,4%) dan investasi langsung BUMN/D/swasta lokal atau asing mencapai Rp127,2 triliun (26,4%). Danis menambahkan, untuk pembangunan infrastruktur dasar diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp865 miliar atau masih sesuai dengan rencana awal. Menurutnya, masih terbuka kemungkinan kebutuhan dana untuk pembangunan itu bisa berubah. “Kita akan terus mendetailkan semua perencanaannya hingga sekitar Juni 2020. Mudah-mudahan sudah dapat angka akuratnya,” ujarnya. CEO Siemens Cedric Neike sebelumnya menyatakan minatnya untuk berkontribusi dalam pembangunan smart city di IKN. “Jerman [melalui Siemens] ingin punya kerja sama dengan Indonesia, seperti halnya pernah dengan Vietnam dan Mesir [dalam membangun smart city].” (Muhamad Wildan/ Aprianus Doni T)